BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke IX, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak di bidang gas, memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas. Hari tersebut diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Oktober 1946, bertempat di gedung Badan Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 235/KPTS/1975, tanggal 30 September 1975. Peringatan Hari Listrik dan Gas kemudian digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember.

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942, di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan

tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonom (gemente), swasta maupun gabungan antara pemerintah dan swasta.

Di Jawa Barat (khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM), yang berdiri pada tahun 1905. pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah Perusahaan Perseroan Gemeemschappelijk Electricitiet BedriffVoor Bandoeng (GEBEO), yang menggantikan BEM dengan Akte Pendirian Notaris Mr. Adrian Hendrik Van Ophuisen No. 213 tanggal 31 Desember 1919.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja seluruh Jawa.

Setelah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerangan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal pengolahan dan penguasaan kelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia.

2.2. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 86

tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan status bahwa PLN menjadi Perusahaan Listrik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUTI No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas, dan wilayah kerja daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994, tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian

2.3. Bidang Pekerjaan Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten adalah perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Jasa yang ditawarkan untuk memudahkan atau meningkatkan mutu:

- Peningkatan pelayanan permintaan penyambungan baru dan penambahan daya dengan dikembangkan pelayanan otomatis pembayaran biaya penyambungan (BP) dan uang jaminan langganan UJL masuk dalam rekening berikutnya.
- Peningkatan pelayanan pembayaran rekening listrik dengan dikembangkan pembayaran melalui payment point selain dengan giralisasi. Yaitu dengan cara transfer dari rekening bank pelanggan ke rekening Bank PT. PLN (Persero) dengan waktu 24 jam.

VISI :

Visi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya, dengan bertumpu pada potensi insani.

MISI :

Misi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten adalah sebagai berikut :

- Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang usaha terkait yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.

- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Selain harus mempunyai Visi dan Misi, perusahaan pun harus memiliki nilai (value) sebagai budaya perusahaan sehingga seluruh organisasi mampu menciptakan nilai bersama sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan. Berikut nilai (values) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten percaya, peduli, sadar biaya, peka/tanggap, terbuka, integritas, pembelajaran.

Filosofi atau Core Beliefs adalah landasan utama sebagai keyakinan untuk mewujudkan Visi dan Misi perusahaan. Landasan filosofi PT. PLN Distribusi Jawa Barat Dan Banten adalah : "mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepentingan pelanggan dengan menjadikan SDM sebagai Sumber Daya penting perusahaan".

2.4.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dibuat dengan tujuan agar pegawai dapat bekerja secara efektif, baik dan efisien. Mengenai Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten pada 7 Januari tahun 2004 telah mengalami perubahan, guna efisiensi sehingga dapat berkinerja lebih baik

lagi. Struktur Organisasi yang baru terbentuk inipun tugas dan wewenangnya masih dalam tahap penyempurnaan, namun Struktur Organisasi berdasarkan SK Direksi PT. PLN No. 021/DIR/1987 tanggal 19 Maret 1987 dan SK No. 093/DIR/1989 tanggal 29 Juli 1989 adalah sebagai berikut :


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM